



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Disusun Oleh :

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Tahun 2024 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 15 Januari 2025
Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun pada telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Pada tahun 2024 terdapat kendala yaitu Kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran SPKP belum sepenuhnya dilakukan permintaan keterangan yang berdomisili di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam. Untuk rencana tindak lanjut tersebut, maka Pangkalan PSDKP Batam akan melakukan permohonan bantuan kepada

UPT PSDKP untuk bantuan permintaan keterangan ataupun melakukan permintaan keterangan melalui *zoom meeting*.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 sebesar **104,24**. Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 sebesar Rp. 56.960.187.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen dengan total realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 56.928.956.696,- atau 99,95%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam	10
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
3.4 Akuntabilitas Keuangan	79
BAB IV PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Rekomendasi	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024	13
2. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024.....	15
3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Tahun 2024 ...	16
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	5
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2024 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2024.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
 - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin;
 - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri; dan
 - d. Adanya ikan hasil importasi yang masih belum sesuai dengan peruntukannya.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Adanya kegiatan pengelolaan produk kelautan berupa pasir laut tidak sesuai dengan wilayah pengelolaan yang diizinkan;

- b. Adanya kegiatan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan
- c. Masih adanya pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dengan perizinan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

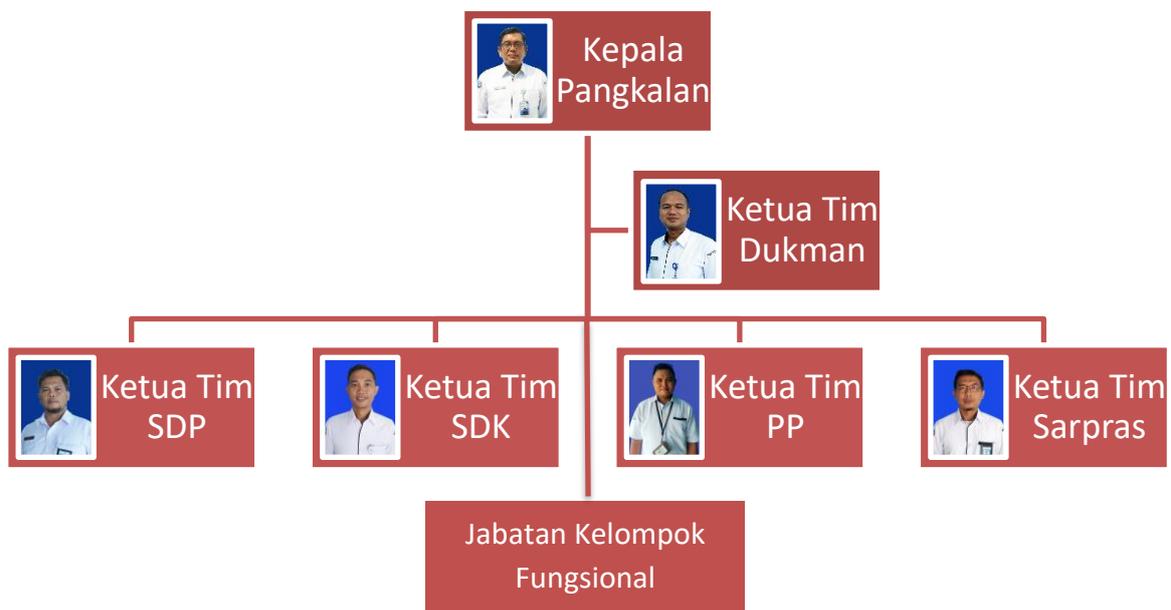
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Perairan;
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi;
 - c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;
 - d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
 - e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
 - f. Pengawasan terhadap adanya Kegiatan *Destructive Fishing*;
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - b. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan; dan
 - c. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
4. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
5. Pendampingan POKMASWAS;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP; dan
7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan

membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 165 pegawai yang terdiri dari 83 PNS, 21 PPPK, 22 PPNPN dan 39 PJLP sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang miliknegera, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan

- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Ditjen. PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 semula sebesar Rp. 59.765.587.000,- kemudian diadakan revisi menjadi sebesar Rp. 56.960.187.000,- Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	80
		15	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	75
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	84
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	70
		22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	94
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)		80
		26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)		93,76
		27	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)		71

Perjanjian kinerja tersebut merupakan revisi dari perjanjian kinerja sebelumnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan target indikator dengan rincian sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024

SEMULA		MENJADI	
INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	70
Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	71	Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	71

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan pengelolaan kinerja tahun 2024, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 10 Sasaran Kegiatan dengan 14 IKU dan 13 IKM. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024

NKO Desember - 2024

Unit Kerja : PANGKALAN PSDKP BATAM

Skor Kinerja : 104.25

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🗑
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Desember	Capaian Desember	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120,00	
IKS.01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	100,00	120,00
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						103,23	
IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	96,61	106,16
IKS.02.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	95,69	105,15
IKS.02.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						100,00	
IKS.03.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
IKS.03.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100,00	
IKS.04.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan						100,00	
IKS.05.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100,00	
IKS.06.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan						100,00	
IKS.07.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan Data Dukung1 ✓ 🗑 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00

8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas							100,00	-
IKS.08.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	80,00	100,00	
IKS.08.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	80,00	100,00	
9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas							107,53	
IKS.09.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	93,00	100,00	107,53	
A.10	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP							111,69	
IKS.10.01	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	87,92	109,90	
IKS.10.02	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	88,98	118,64	
IKS.10.03	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	
IKS.10.04	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	80,67	115,24	
IKS.10.05	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Data Dukung2 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	87,90	107,20	
IKS.10.06	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	84,00	85,20	101,43	
IKS.10.07	Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	
IKS.10.08	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Data Dukung2 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	81,38	116,26	
IKS.10.09	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	1,00	100,00	
IKS.10.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	
IKS.10.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	
IKS.10.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	89,02	111,28	
IKS.10.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	93,76	96,36	102,77	
IKS.10.14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	71,00	95,00	120,00	

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2024 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2024.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sampai dengan akhir Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1 (Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif)**

yaitu:

1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	100	120,00
		2024	81	100	120,00

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 81 dan tercapai 100.

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.

Terdapat dua kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024, yaitu di Jambi dan Palembang. Kegiatan di Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan anggota komisi IV DPR RI Bapak M.R. Ihsan Yunus, BA.,M.Comm.,ME.Con dengan POKMAWAS yang mengikuti yaitu Lubuk Intan, Lubuk Guci, Pematang Gelanggang, Pematang Kunyit dan Lestari Makmur. Sedangkan kegiatan di Palembang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dengan anggota komisi IV DPR RI Ibu Hj. Sri Kustina serta POKMASWAS yang mengikuti yaitu Sri Jaya, Maju Bersama, Manu, Ulak Jaya, Teluk Resau, Aur Jaya, Belanti Mandiri, Setule, Talang Enau dan Pancur. Pada tahun 2023 capaian indikator ini tercapai 100, capaian ini sama dengan tahun 2024 dimana juga sebagai akhir periode renstra. Selama periode renstra, indikator Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas hanya terdapat di tahun 2023 dan 2024. Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 199.997.833,- atau 99,99%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2024 sama yaitu 100%. Hal ini karena terselesaikannya kegiatan pembinaan POMASWAS yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dengan bermitra

Anggota Komisi IV DPR RI. Seluruh UPT Pangkalan PSDKP mendapatkan target ini pada tahun 2023 dan 2024.

Evaluasi dan analisis pada IKU2, IKU3 dan IKU4 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

2) Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	85	94,38	111,04
		2023	87,6	100	114,16
		2024	91	96,61	106,16

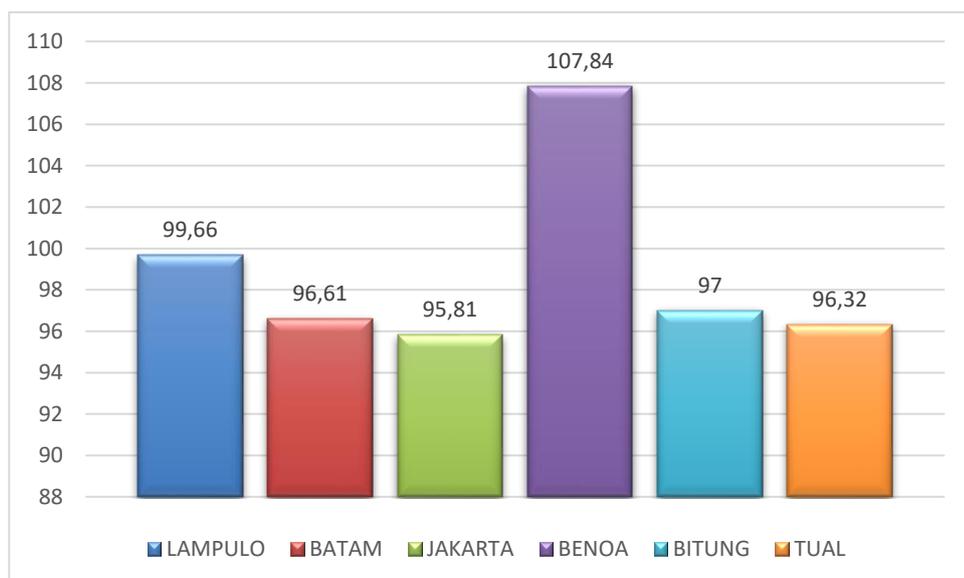
Target indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 91 dan tercapai sebesar 96,61. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi sebanyak total 154 hari operasi dengan jumlah total kapal yang diperiksa yaitu 441 unit kapal perikanan dan 35 objek pengelolaan sumber daya kelautan. Jadi rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak lebih dari 2 unit per hari operasi dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	RIKSA	
			KAPAL	SDK
1	KP. HIU MACAN 05	49	154	4
2	KP. HIU 03	53	133	12
3	KP. HIU 17	51	154	19
JUMLAH TOTAL		154	441	35

Selain itu, tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber

daya perikanan, Kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan.

Indikator “*Indeks Kinerja Operasi kapal Pengawas*” pada tahun 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra kurang optimal jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan capaian hari operasi dari yang sebelumnya sebanyak 279 hari operasi menjadi 154 hari operasi dilaksanakan oleh KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 17.352.857.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 17.348.600.323,- atau 99,98% dari pagu. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian indek kinerja operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Jakarta dan Tual. Hal tersebut dikarenakan jumlah kapal pengawas yang dioperasikan di Pangkalan PSDKP Batam lebih banyak sehingga cakupan serta jumlah kapal yang diperiksa lebih banyak. Selain itu kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penangkapan pada kapal perikanan asing maupun Indonesia yang

telah melakukan pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP lainnya.

3) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

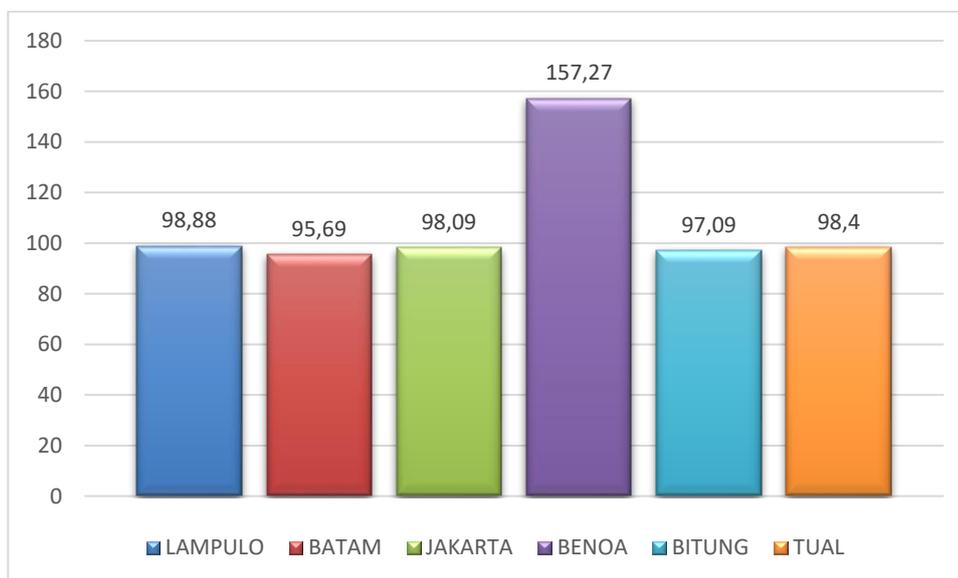
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	85	99,93	117,56
		2023	87,6	95,54	109,06
		2024	91	95,69	105,15

Target indeks Kinerja Operasi Speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 91 dan tercapai sebesar 95,69. Indikator ini mengukur kemajuan operasional speedboat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Optimalnya indikator ini tahun 2024 telah dilaksanakannya operasi pengawasan menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam dengan total 472 hari operasi dengan total kapal yang diperiksa sebanyak 430 unit kapal perikanan Indonesia dan 29 lokasi pemantauan/pengintaian terhadap kegiatan penyelundupan *baby lobster*. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 unit per hari operasi dan 1 lokasi pengintaian dengan rincian sebagai berikut.

No	Speedboat/URC/RIB	Hari Ops	Riska Kapal
1	Dolphin 08	30	44
2	Dolphin 15	30	55
3	Dolphin 18	30	37
4	Dolphin 23	30	45
5	Dolphin 24	30	44
6	Napoleon 15	30	35
7	Napoleon 16	33	29

No	Speedboat/URC/RIB	Hari Ops	Riska Kapal
8	Napoleon 27	39	15
9	Napoleon 35	35	60
10	RIB/Sea Rider X-8	35	16
11	Rubber Boat Wilker Bangka	30	50
12	Hiu Biru 01	60	25
13	Hiu Biru 02	60	4
TOTAL		472	459

Capaian indikator ini belum optimal jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat selisih indeks sebesar 0,15. Pada tahun 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra, *rubbeboat* Satwas SDKP Bangka telah melakukan operasi pengawasan dimana pada tahun 2023 unit ini sedang perawatan. Selain itu terdapat penambahan cakupan wilayah pengawasan serta capaian hari operasi. Pagu anggaran untuk operasi *speedboat* pengawas pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.856.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.855.976.177,- atau 99,95% dari pagu. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Seluruh UPT Pangkalan PSDKP telah mencapai target pada indikator Indeks Kinerja Operasi Speedboat. Hal ini dikarenakan hari operasi *Speedboat* pada setiap UPT telah sesuai dan telah melakukan pemeriksaan terhadap minimal 1 kapal

perikanan per hari. Selain itu terdapat Unit Reaksi Cepat (URC) di Pangkalan PSDKP Batam dan Jakarta yang telah melakukan kegiatan pengawasan dengan target penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL).

4) Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Target Presentase pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 adalah 100% dan tercapai 100%. Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP baik logistik untuk kapal maupun untuk personel. Terdapat beberapa indikator untuk mencapai target kegiatan ini, yaitu:

- a. Pemenuhan logistik kapal:
 - 1) Bahan bakar minyak (BBM)
 - 2) Pelumas
- b. Pemenuhan logistik Personel:
 - 1) Bahan makanan
 - 2) Air tawar
 - 3) Alat-alat pelayanan (ATK, Bahan computer, komaliwan, peta, jurnal, dll)
 - 4) Senjata api dan amunisi.

Tercapainya indikator ini dikarenakan seluruh logistik kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah terpenuhi mulai dari BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata api dan amunisi. Terhadap pemenuhan logistik tersebut, maka kapal pengawas telah

membuat Berita Acara Akhir Bulan penggunaan BBM, invoice pembelian Pelumas, Natura, air bersih dan ATK serta Laporan Penggunaan Senjata dan Amunisi sebagai bentuk pertanggung jawaban kapal pengawas.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka capaian tahun 2024 sama yaitu 100% yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 seluruh kebutuhan logistik kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam terpenuhi. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 17.329.243.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 17.324.987.713,- atau 99,98% dari pagu. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian indikator ini sama dengan Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini karena kebutuhan logistik pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP seluruhnya telah terpenuhi, baik BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata dan amunisi. Kemudian atas pemenuhan tersebut telah disusunnya dokumen-dokumen laporan atas pemenuhan logistik tersebut oleh kapal pengawas sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Evaluasi dan analisis pada IKU5 dan IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan**

3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana

Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan) yaitu:

5) Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Target persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan pada tahun 2024 dan menjadi target tahunan serta tercapai 100%. Indikator merupakan target dalam pelaksanaan fisik renovasi bangunan Satwas SDKP Palembang, Pagar Satwas SDKP Belitung dan garasi *Speedboat* Pangkalan PSDKP Batam serta seluruh kegiatan tersebut telah di laksanakan. Pada tahun 2023 hanya terdapat 1 target renovasi Satwas SDKP Palembang dan pada akhir tahun anggaran dilakukan pemotongan anggaran, sehingga kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Capaian Indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa. Pagu anggaran untuk Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun sebesar Rp. 1.465.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.462.865.662,- atau 99,84%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Seluruh Pangkalan PSDKP mendapatkan anggaran untuk indikator ini. Capaian indikator ini untuk setiap UPT Pangkalan PSDKP sama yaitu 100% yang dikarenakan perencanaan/pembangunan/renovasi telah dilaksanakan pada tahun 2024.

6) Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Perhitungan indikator ini membandingkan jumlah sarana pengawasan yang selesai dirawat dengan target kegiatan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Sarana pengawasan yang dimaksud meliputi kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*) dan

perawatan darurat (*breakdown maintenance*) Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05. Kemudian untuk speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 13 unit.

Kemudian untuk speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 13 unit. Adapun rincian perawatan armada adalah sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana	Perawatan
1	KP Hiu Macan 05	Perawatan rutin
2	KP Hiu 17	Docking
3	KP Hiu 03	Perawatan rutin
4	Speedboat Pengawas Dolphin 08	Perawatan rutin
5	Speedboat Pengawas Dolphin 015	Perawatan rutin
6	Speedboat Pengawas Dolphin 018	Perawatan rutin
7	Speedboat Pengawas Dolphin 023	Perawatan rutin
8	Speedboat Pengawas Dolphin 024	Perawatan rutin
9	Speedboat Pengawas Napoleon 015	Docking
10	Speedboat Pengawas Napoleon 016	Perawatan rutin
11	Speedboat Pengawas Napoleon 027	Perawatan rutin
12	Speedboat Pengawas Napoleon 035	Perawatan rutin
13	Speedboat Pengawas Hiu Biru 01	Perawatan rutin
14	Speedboat Pengawas Hiu Biru 02	Perawatan rutin
15	Rigid Inflatable Boat	Perawatan rutin
16	Rubber Boat Sadai	Perawatan rutin

Tujuan indikator ini untuk mengukur sejauhmana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP. Tercapainya indikator "*Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP*" dikarenakan seluruh sarana pengawasan berupa kapal dan *speedboat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam dilaksanakan perawatan baik rutin maupun darurat, sehingga armada pengawasan siap beroperasi. Indikator ini capaiannya sama tahun 2023 dan 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir

renstra, yaitu 100%. Pagu anggaran tahun 2024 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp. 7.940.580.000,- serta terealisasi anggaran 99,98% atau sebesar Rp 7.938.744.065,-. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian indikator ini sama 100% karena perawatan sarana dan prasarana dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu untuk perawatan kapal dan *speedboat* pengawas pasti dilakukan sebab ada perawatan rutin yang harus dilakukan agar unit-unit tersebut siap beroperasi.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)** yaitu:

- 7) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2024 sebesar 100 dan tercapai 100. Hal ini dikarenakan adanya penambahan personil Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini. Pengawasan dilakukan terhadap 17 Pelaku usaha Pulau-Pulau Kecil, 131 Pelaku usaha ruang laut, 10 Pelaku usaha wilayah pesisir, 59 Pelaku usaha pencemaran perairan, 29 Pelaku usaha jasa kelautan, 13 Pelaku usaha pemanfaatan wilayah konservasi, 23 Pelaku usaha ikan dilindungi, 13 pelaku usaha produk kelautan dan 85 Pelaku usaha bebas kegiatan ikan yang merusak.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2024 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

- a) Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau

Appendiks CITES sesuai ketentuan perlingkungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

b) Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

c) Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi.

d) Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

e) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

f) Wisata tirta lainnya

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking mangrove*, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

g) Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan

h) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Usaha yang meliputi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku atau Aktifitas penunjang treatment air.

i) Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

j) Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan *destructive fishing* (DF). *Destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan).

k) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)

Parameter :

- Memiliki dokumen KKPR

- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Capaian indikator ini pada tahun 2023 dan 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra sama yaitu 100. Capaian tersebut dikarenakan seluruh target *output* pengawasan sumber daya kelautan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang dipedomani. Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.571.938.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 2.457.795.000,-, serta terealisasi sebesar Rp. 2.453.318.453,- atau 99,82%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2024 sama yaitu 100. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan serta tercapainya target output pada indikator ini. Tahapan-tahapan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika pengawas kelautan dan/atau polsus PWP3K melakukan kegiatan pengawasan.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 5**

(Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan) yaitu:

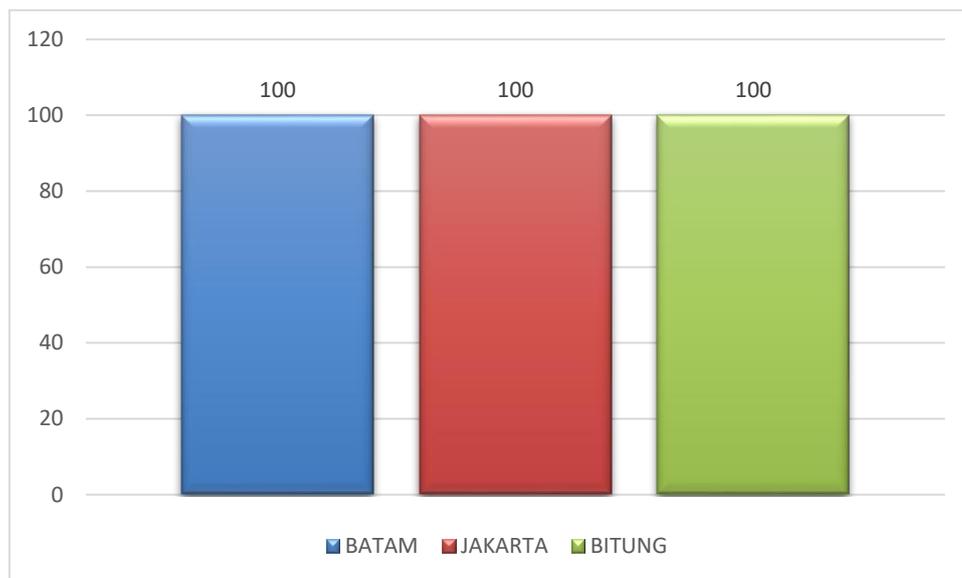
8) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU8	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan 100% dan terdapai 100%. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Tercapainya target ini dikarenakan seluruh informasi maupun aduan yang disampaikan kepada Pangkalan PSDKP Batam dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan telah selesai ditindaklanjuti yaitu adanya pelanggaran berupa penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*) di wilayah Kepulauan Anambas. Kemudian dilakukan pengawasan bersama dan ditemukan pelaku usaha atas nama Rizal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya. Maka terhadap kedua pelaku usaha tersebut telah dikenakan sanksi pidana.

Indikator ini apabila dibandingkan tahun 2023 dan 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra, maka capaiannya sama yaitu 100. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 131.415.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 131.380.974,- atau 99,97%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2024 sama yaitu 100% serta hanya Pangkalan PSDKP Batam, Jakarta dan Bitung yang mendapatkan target kegiatan ini. Karena terselesaikannya kegiatan tindak lanjut atas hasil aduan, informasi dan data bidang kelautan sehingga dilakukannya kegiatan pengawasan sampai dengan pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 6 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan)** yaitu:

9) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU9	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan tahun 2024 adalah 100. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, yaitu pengawasan kapal perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap 316 ID Proyek pelaku usaha pengelolaan perikanan yang terdiri dari 49 subsektor pemasaran hasil perikanan, 113 subsektor penangkapan ikan, 128 subsektor budidaya perikanan dan 26 subsektor pengolahan hasil perikanan.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. yang terbentuk dari beberapa komponen berikut:

a) Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

b) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO.

c) Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2024 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat. Pemeriksaa importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan

d) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah.

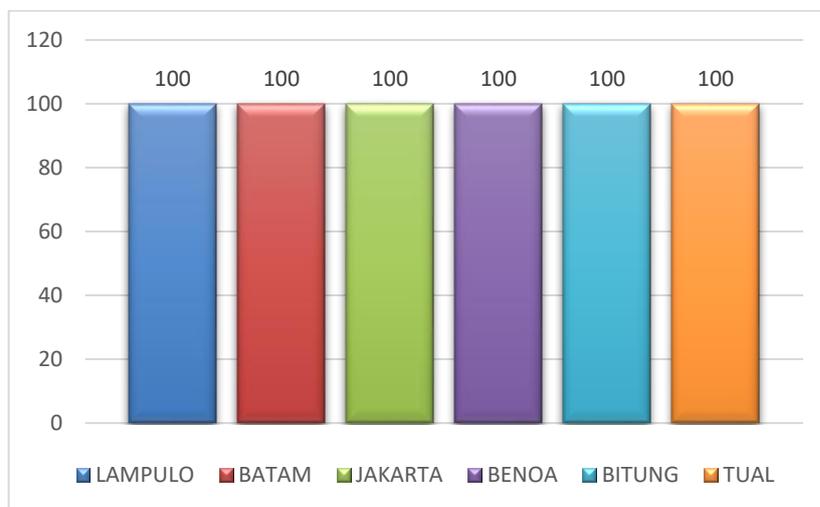
e) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.

f) Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha ilegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Capaian indikator ini pada tahun 2023 dan 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra sama yaitu 100. Capaian tersebut dikarenakan seluruh target *output* pengawasan sumber daya perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang dipedomani. Pada tahun 2024 pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dianggarkan sebesar Rp. 1.352.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 1.344.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.339.867.211,- atau 99,69%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2024 sama yaitu 100. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan serta tercapainya target output pada indikator ini.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan)** yaitu:

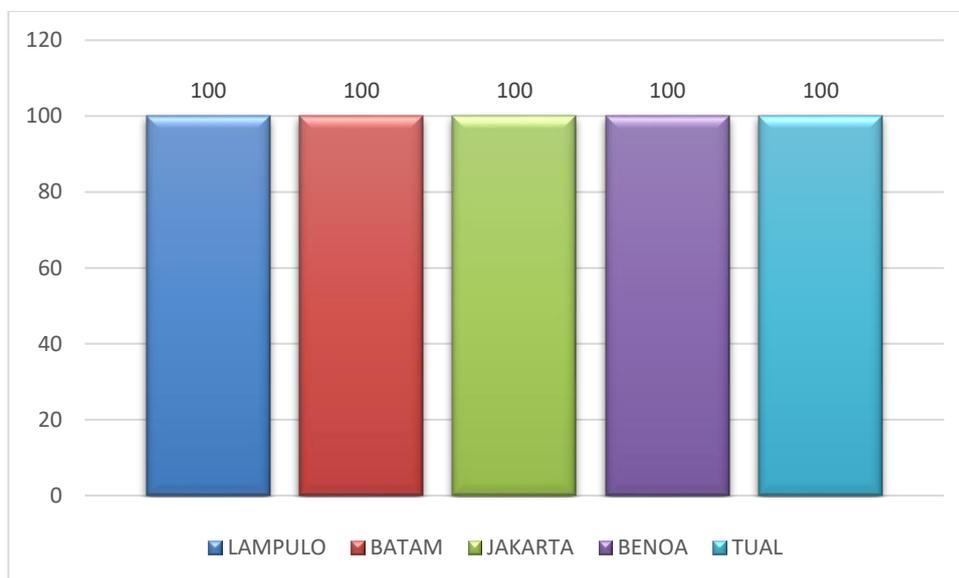
10) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU10	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan 100% menjadi target tahunan. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh pengawas perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Tercapainya target ini dikarenakan seluruh informasi maupun aduan yang disampaikan kepada Pangkalan PSDKP Batam dalam bidang pengelolaan sumber

daya perikanan telah selesai ditindaklanjuti yaitu telah digagalkannya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah Kota Batam sebanyak 49 box/88.200 ekor Benih Bening Lobster (BBL).

Capaian Indikator ini pada tahun 2023 dan 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra sama yaitu 100. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan pada tahun 2024 sebesar Rp. 61.790.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 61.787.421,- atau 99,99%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2023 sama yaitu 100% serta hanya Pangkalan PSDKP Bitung yang tidak mendapatkan target kegiatan ini. Karena terselesaikannya kegiatan tindak lanjut atas hasil aduan, informasi dan data bidang perikanan sehingga dilakukannya kegiatan pengawasan sampai dengan penanganan barang bukti maupun sanksi baik administratif maupun pidana.

Evaluasi dan analisis pada IKU11 dan IKU12 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 8 (Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas)** yaitu:

11) Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU11	Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	86,79	108,49
		2024	80	80	100,00

Capaian indeks pengenaaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 80. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pengenaaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Tahun 2024, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaaan sanksi administratif kepada pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan rincian sebagai berikut.

No	Pelaku Usaha	Uraian pelanggaran	Denda/SP
1	PT. Dirgantara Inti Abadi	1). Pelanggaran atas Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya	Rp 225.486.995
2	PT. Megah Puri Lestari	1). Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT); 2). Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 15.397.766
3	PT. Eunindo Usaha Mandiri (EUM)	1). Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 212.391.600

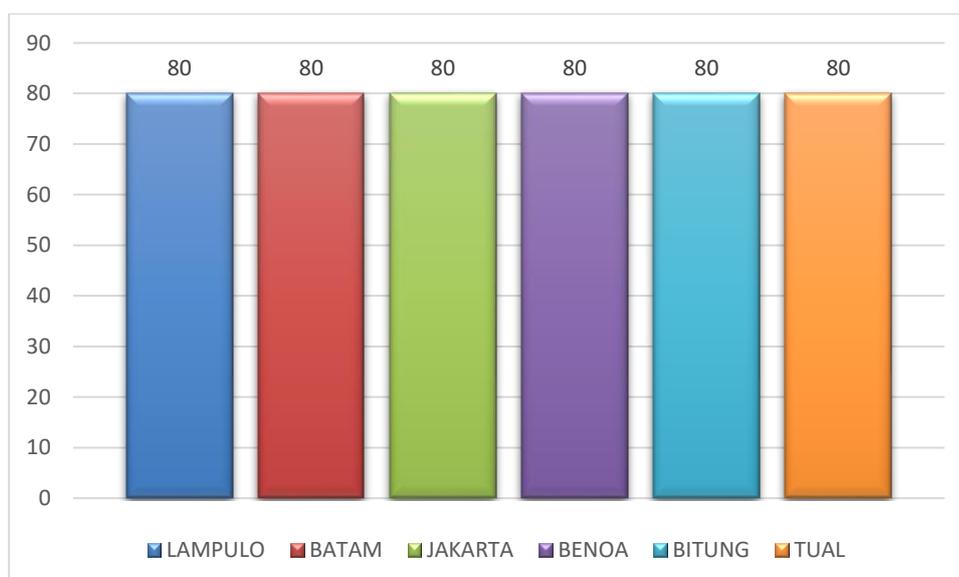
No	Pelaku Usaha	Uraian pelanggaran	Denda/SP
4	PT. Bintang Mahkota Sukses	1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2) Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	Rp 12.992.711
5	PT. Sumber Alam Antarnusa	1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2) Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	Rp 68.577.492
6	PT. Tuah Tiara Nusa	1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2) Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	Rp 98.456.330
7	PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 191.470.000
8	PT. Cahaya Rahmata Pura Jaya	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	Rp 239.827.450
9	PT. Jaku Jaya	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 18.076.051
10	IPR Edy Anwar	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 18.680.000
11	PT. Buana Cipta Mandala	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 62.506.000
12	PT. Dabo Bina Sukses	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 50.460.007

No	Pelaku Usaha	Uraian pelanggaran	Denda/SP
13	PT. Bahari Berkah Madani	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 181.291.894
14	PT. Mitra Bangka Resources	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 116.633.250
15	IPR Perkumpulan Rezeki Anak Melayu	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Rp 32.876.800
16	PT Asia Metal International	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 143.907.984
17	PT. Putra Bentan Cabang Natuna	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 19.567.608
18	PT. Multi Mineral Indonesia	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 113.104.030
19	PT. Terusan Jaya Bersama	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	SP 1
20	CV. Ankira	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	SP 1
21	PT. Taman Nongsa Indah Village	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	SP 1

No	Pelaku Usaha	Uraian pelanggaran	Denda/SP
22	PT. Cemara Intan Shipyard	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 16.590.000
23	CV. Saputra Kembar	1). Pelanggaran terhadap Ketentuan dan/atau Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi 2). Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut 3). Pelanggaran atas Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	Rp 39.616.841
24	Niko Hakim Belitung	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi	Rp 209.280.982
25	PT. Optic Marine Indonesia	PT OMI melaksanakan penggelaran SKKL ADC tidak sesuai dengan koordinat PKKPRIL yang telah diterbitkan yang melebihi batas zona keamanan dan keselamatan paling jauh 500 meter sisi terluar bangunan dan instalasi di laut berdasarkan Pasal 31 ayat (3) PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan.Total panjang kabel tergelar tidak sesuai PKKPRIL 7,480627 km ~ 7.480,627 m	Rp 666.886.087
26	PT. Vesinter Indonesia	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	SP 1
27	PT. Servotech Indonesia	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	SP 1
28	PT. Sumber Bahari Abadi	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	SP 1
29	PT. Samudra Inti Persada	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	SP 1
30	KM. SOYO BAROKAH	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan dan mematikan VMS	Rp 108.033.000
31	KM. SRI INTAN -12	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	Rp 16.965.000
32	PT.SUMBER LAUT ALAM	pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Pelanggaran Peruntukan importasi komoditas Perikanan	Rp 26.552.500

No	Pelaku Usaha	Uraian pelanggaran	Denda/SP
33	KM. MINA SAMUDRA ABADI	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	Rp 155.661.600
34	KM. SARI BUNGA	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	Rp 140.764.800
35	KM. LUCAS CENDANA JAYA	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	Rp 118.215.600
36	KM. BAHAGIA NATUNA	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	SP 1
37	KM. SEJAHTERA NATUNA - I	Pelanggaran Perizinan Berusaha Berupa Melakukan Penangkapan Ikan di luar daerah Penangkapan ikan yang telah ditentukan dalam dokumen perizinan	SP 1
TOTAL			Rp 3.320.270.378

Indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat selisih indeks 6,79 yang dikarenakan adanya selisih jumlah pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif. Pada tahun 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra cenderung menurun, hal ini menandakan bahwa ingkat kepatuhan pelaku usaha mulai meningkat. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 untuk pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp. 406.445.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 406.435.221,- atau 99,99%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian indikator Pangkalan PSDKP Batam sama dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini menandakan bahwa penerapan sanksi administratif pada masing-masing UPT telah selesai dilaksanakan.

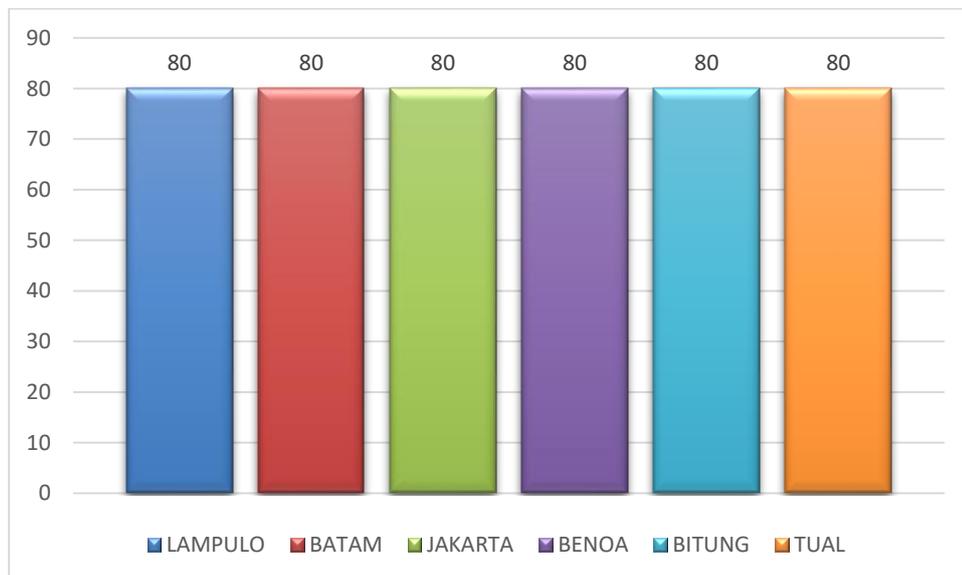
12) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	73,59	91,99
		2024	80	80	100,00

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 80 dan tercapai 100. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tercapainya indikator ini dikarenakan sudah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 202 unit kapal perikanan Indonesia yang indikasi melakukan pelanggaran dari total 260 kapal perikanan Indonesia. Terhadap kapal yang lain dilakukan proses tindak lanjut pada tahun 2025 dikarenakan sampai dengan berakhirnya tahun 2024 kapal masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dan belum Kembali ke Pelabuhan Pangkalan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka pada tahun 2024 ini terdapat peningkatan indeks sebesar 6,41 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan hasil tindak lanjut SPKP untuk kapal dengan domisili di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam. Untuk kapal yang belum dilakukan tindak lanjut merupakan kapal yang berada di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam namun kapal perikanan yang dioperasikan memiliki izin Pelabuhan Pangkalan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, sehingga akan dilaksanakan tindak lanjut ketika kapal melaporkan kedatangan di Satwas/Wilker/UPT Pangkalan PSDKP Batam. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 untuk analisis pemantauan kapal perikanan mendapat pagu sebesar Rp 404.672.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 404.662.221,- atau 99,99%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian Pangkalan PSDKP Batam sama dengan capaian UPT Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini menandakan bahwa UPT Pangkalan PSDKP telah melakukan tindak lanjut terhadap indikasi pelanggaran kapal perikanan melalui hasil analisis SPKP.

Evaluasi dan analisis pada IKU13 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 9 (Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas)** yaitu:

13) Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU14	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	93	97,78	105,14
		2024	93	100	107,53

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar 100. Indikator ini merupakan perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapaiannya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 telah menangani 8 kasus TPP dan seluruhnya telah tahap II dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA TERSANGKA	NAMA KAPAL	PELANGGARAN	KETERANGAN
1	MIN TUN alias NAI THIN TUN	KM. PSF 2500	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau	INCRAHT

NO	NAMA TERSANGKA	NAMA KAPAL	PELANGGARAN	KETERANGAN
			trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	
2	KYAW HTAT	KM. PKFB 1269	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
3	VO VAN CANG	KM.BV 4417 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Pair trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
4	BUI CHI HONG	KM.BV 1182 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Pair trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
5	NGUYEN TRI HOANG	KM. KG 9324 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
6	NGUYEN TRI AN	KM. KG 90520 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT
7	RIZAL	Pompong Tanpa Nama	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pukat hela atau trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan	INCRAHT

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka pada tahun 2024 terdapat peningkatan indeks sebesar 2,22 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Adanya selisih ini dikarenakan seluruh kasus TPKP pada tahun 2024 telah selesai tahap II. Sedangkan pada tahun 2023 masih ada kasus sampai dengan akhir tahun masih belum tahap II. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp 763.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 761.578.606,- atau 99,74%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam sama yaitu 100. Capaian ini menandakan bahwa seluruh kasus TPKP pada masing-masing UPT Pangkalan PSDKP telah selesai tahap II.

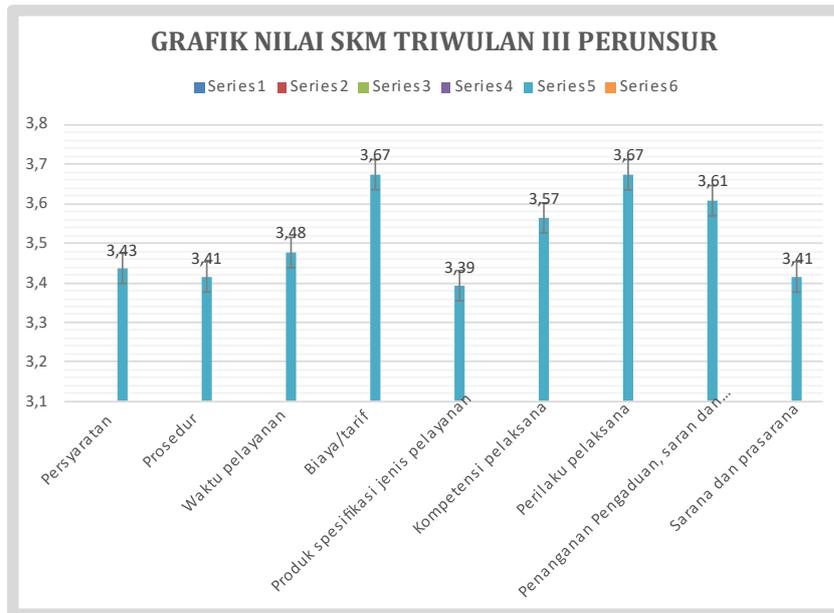
Evaluasi dan analisis pada IKU14, IK15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21, IK22, IK23, IK24, IK25, IK26 dan IK27 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 10 (Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP)** yaitu:

14) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

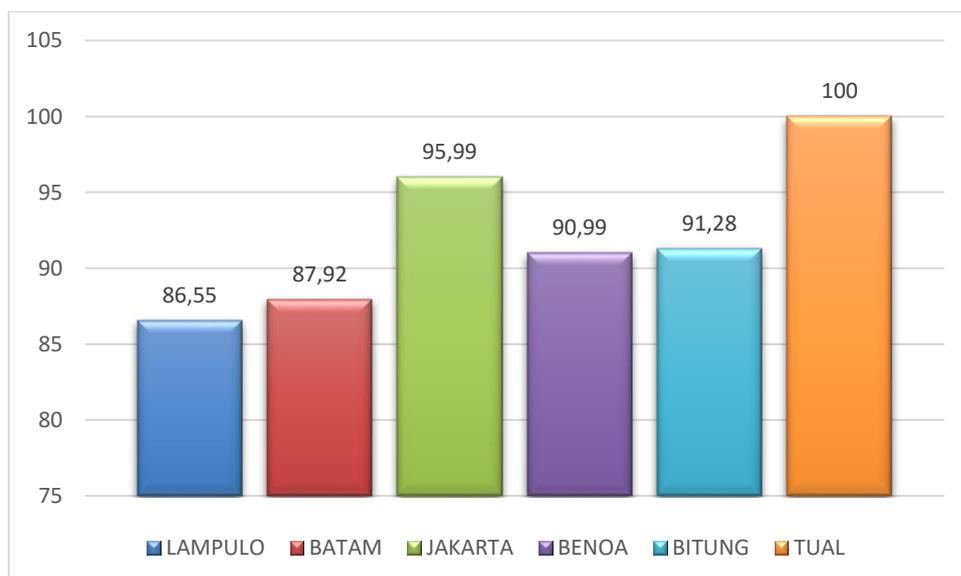
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	2020	80	87,08	108,85
		2021	80	91,40	114,25
		2022	80	88,93	111,16
		2023	80	89,00	111,25
		2024	80	87,92	109,90

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 87,92. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Capaian tersebut diperoleh dari 46 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 87,92 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima serta adanya pendampingan dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam pengelolaan survey sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal dengan rincian sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat selisih indeks sebesar 1,08 pada tahun 2024 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal ini dikarenakan terdapat selisih jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pangkalan PSDKP Batam. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah acuan untuk peningkatan pelayanan di tahun berikutnya. Pada tahun 2024 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 77.456.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 77.386.369,- atau 99,91%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capain indikator Pangkalan PSDKP Batam masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo. Pelayanan yang baik dan prima dilaksanakan oleh petugas Pangkalan PSDKP Batam memberikan dampak yang positif terhadap penilaian dari pengguna layanan.

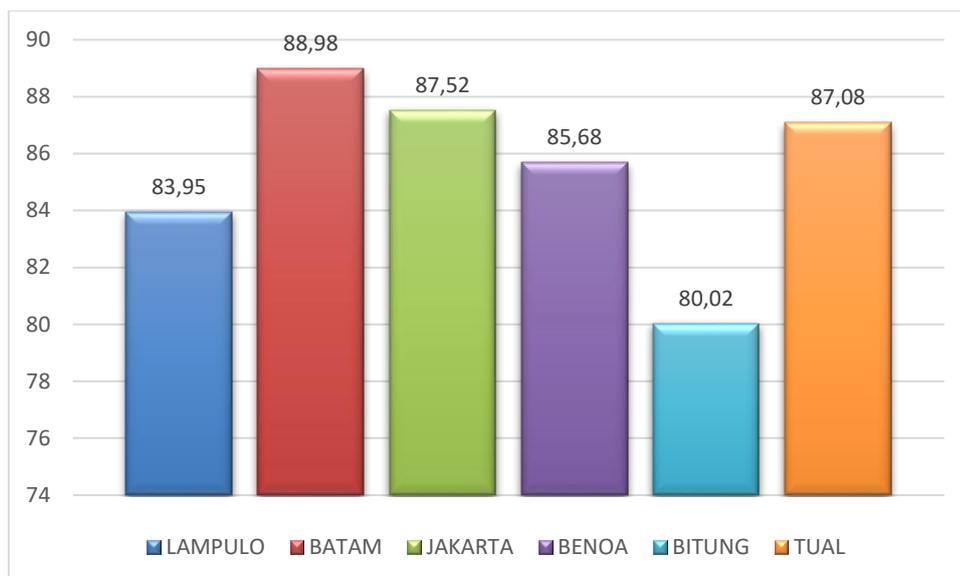
15) Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK15	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	75	88,23	117,64
		2021	75	78,41	104,55
		2022	75	80,58	107,44
		2023	75	90,90	120,00
		2024	75	88,98	118,64

Target Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 adalah 75 dan tercapai 88,98. Pelaksanaan WBK berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tercapainya indikator ini karena seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Batam telah menerapkan nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan pekerjaan baik bidang administrasi maupun teknis. Selain itu adanya pendampingan dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam pemenuhan dokumen Zona Integritas. Untuk rincian nilai sebagai berikut.

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A.	PENGUNGKIT	60,00	49,11	
I.	PEMENUHAN	30,00	24,75	82,51%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	4,00	100,00%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	3,08	88,10%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	2,98	59,50%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	5,00	100,00%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	4,78	63,69%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,92	98,33%
II.	REFORM	30,00	24,36	81,20%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	4,00	100,00%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	0,84	23,86%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	5,00	100,00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,20	84,00%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	6,58	87,67%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,75	75,00%
TOTAL PENGUNGKIT			49,11	81,85%
B.	HASIL	40,00	39,87	
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	22,41	99,61%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,41	99,50%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	17,46	99,75%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	17,46	99,75%
TOTAL HASIL			39,87	99,67%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			88,98	

Jika dibandingkan tahun 2023, terdapat selisih 1,12 pada tahun 2024 yang juga menjadi capaian pada akhir periode renstra. Adanya selisih ini dikarenakan belum optimalnya pemenuhan dokumen pada aspek pengungkit khususnya kelompok kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan. Kemudian pada aspek Reform terdapat kekurangan dokumen pada kelompok kerja Penataan Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas. Terhadap kedua kelompok kerja tersebut kekurangan pada dokumen yang akan tersedia pada triwulan IV berakhir, sedangkan penilaian dilakukan pada saat triwulan IV berjalan. Sehingga dokumen yang disediakan hanya sampai pada triwulan III tahun 2024. Pada tahun 2024 pagu anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 77.456.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 77.386.369,- atau 99,91%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Jakarta, Bitung, Benoa, Lampulo dan Tual. Hal ini dikarenakan Sebagian besar dokumen reformasi birokrasi telah tersedia, hanya saja masih terdapat beberapa evaluasi pada redaksionalnya.

16) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan

kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Tercapainya indikator ini dikarenakan telah dilakukan pengendalian mitigasi melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan setiap triwulan pada pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Kemudian adanya pendampingan dari tim Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam monitoring serta evaluasi form pengendalian pada setiap UPT PSDKP. Indikator ini mulai ditargetkan pada tahun 2023 dengan capaian sampai akhir periode renstra sama yaitu 100% pada tahun 2024. Adapun anggaran tahun 2024 untuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 208.536.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.534.329,- atau 99,99%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian indikator ini pada seluruh Pangkalan PSDKP sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada kegiatan yang memiliki risiko besar telah dilakukan mitigasi sejak awal. Sehingga pada saat pelaksanaan dapat meminimalisir risiko yang terjadi.

17) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	100	80,67	115,24

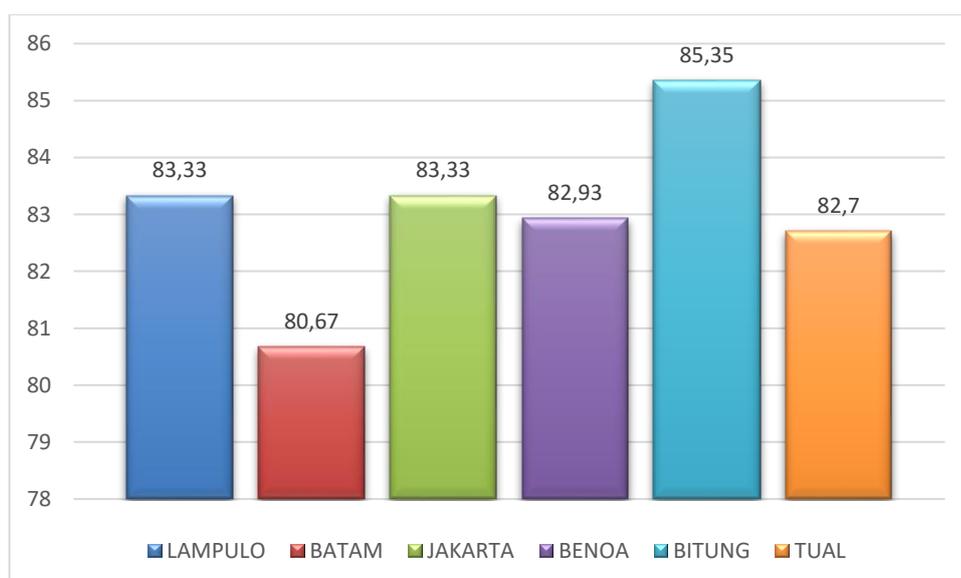
Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP yaitu 70 dan menjadi target tahunan serta tercapai 80,67. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah,

dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Adanya pendampingan dari tim Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP terkait pengelolaan kearsipan juga mendukung dalam pencapaian target indikator ini. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini mulai ditargetkan pada akhir periode renstra yaitu tahun 2024. Adapun anggaran tahun 2024 untuk Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan persuratan sebesar Rp. 32.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.272.576,- atau 99,67%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya, maka capaian Pangkalan PSKDP Batam masih belum optimal namun sudah melebihi dari target yang ditentukan. Nilai ini merupakan hasil penilaian ataupun audit dari tim pengawasan kearsipan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

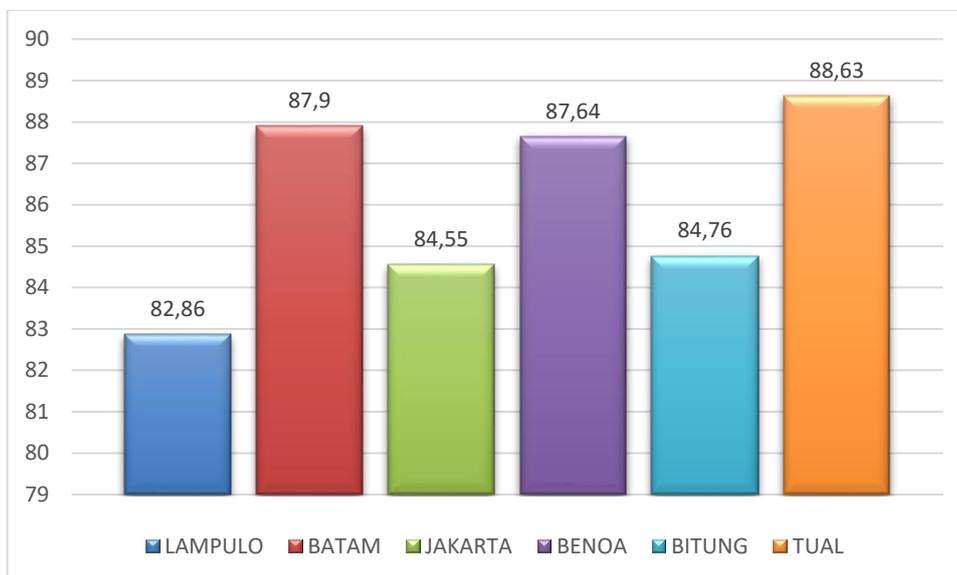
18) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	72	73,3	101,80
		2021	73	79,03	108,27
		2022	77	80,43	103,89
		2023	78	89,04	114,15
		2024	82	87,9	107,20

Target Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2024 adalah 82 dan tercapai 87,9. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin. Tercapainya indikator ini dikarenakan terdapat pegawai Pangkalan PSDKP Batam yang telah mengikuti bimtek, tugas belajar dan izin belajar dengan rincian sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pegawai Mengikuti
1	Bimtek/Pelatihan/Diklat	32
2	Tugas Belajar	4
3	Izin Belajar	9

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat selisih indeks sebesar 1,14, sebelumnya 89,04 menjadi 87,9 yang juga menjadi capaian pada akhir periode renstra. Hal ini dikarenakan adanya selisih pegawai yang mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring dari tahun sebelumnya. Adanya pegawai yang masih belum melaporkan sertifikat kegiatan Bimtek, Seminar maupun FGD juga menyebabkan capaian indikator ini terdapat selisih dari tahun sebelumnya. Adapun anggaran tahun 2024 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu penatausahaan SDM dan jabatan fungsional sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.907.001,- atau 99,93%. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



IP ASN Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta, Bitung dan Benoa. Hal ini menunjukkan pegawai Pangkalan PSDKP Batam Sebagian besar telah mengikuti pelatihan maupun bimtek secara *online* maupun

offline. Serta semakin meningkatnya jumlah pegawai yang melaksanakan izin belajar serta tugas belajar.

19) Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam

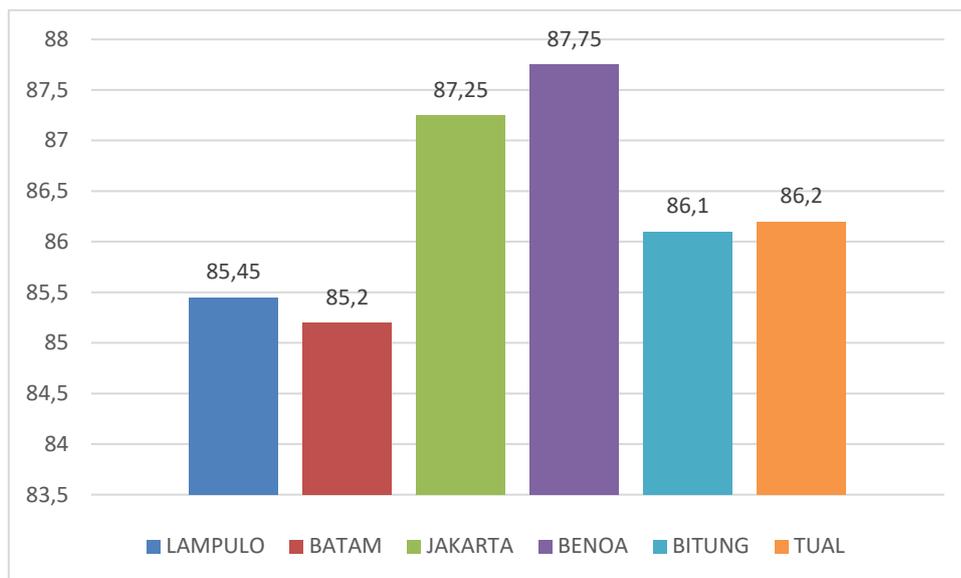
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80,5	81,25	100,93
		2024	84	85,2	101,43

Target Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu 84 dan tercapai 85,20. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Untuk rincian nilai sebagai berikut.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.80	86.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00	100.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyetaraan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	6.00	100.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	3.00	100.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.25	70.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	11.25	90.00%

Terhadap hasil evaluasi tersebut maka SAKIP di Pangkalan PSDKP Batam telah berpredikat Baik. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya pendampingan

dari tim Monev Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebelumnya 81,25 maka pada tahun 2024 menjadi 85,2, terdapat peningkatan nilai sebesar 3,95 dimana juga sebagai capaian pada akhir periode renstra. Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 38.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.011.972,- atau 99,40%. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Seluruh Pangkalan lingkup Ditjen. PSDKP telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria A. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi telah tersedia.

20) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK20	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	70	100	120,00
		2023	75	100	120,00
		2024	80	100	120,00

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 80% dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan seluruh hasil evaluasi dari Itjen telah ditindaklanjuti Pangkalan PSDKP Batam serta pendampingan tim Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam tindak lanjut hasil pengawasan ini. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaian indikator ini sama yaitu 100% Dimana juga sebagai capaian akhir periode renstra. Seluruh rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditindaklanjuti dan disampaikan. Terdapat beberapa audit, reviu dan evaluasi mengenai keuangan, kinerja, BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal KKP, Pangkalan PSDKP Batam telah nihil temuan. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk indikator ini yaitu pengelolaan data pengawasan SDKP sebesar Rp. 208.536.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.534.329,- atau 99,99%. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian indikator ini di Pangkalan PSDKP Batamsama dengan capaian UPT Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini dikarenakan seluruh rekomendasi tindak lanjut Itjen di Pangkalan PSDKP Batam seluruhnya telah dilaksanakan.

21) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

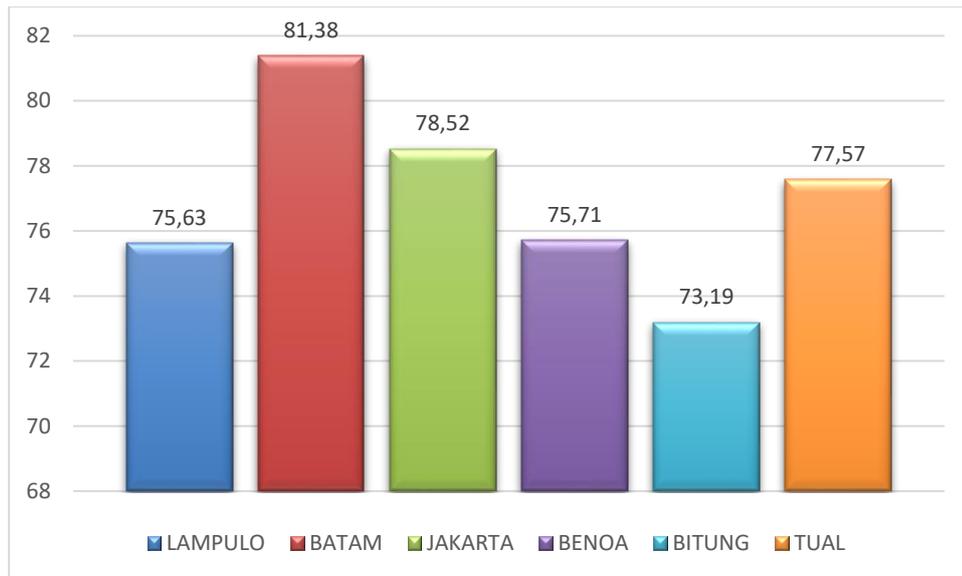
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	21	23,16	110,29
		2023	21	28,18	120,00
		2024	70	81,38	116,26

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 70 dan tercapai 81,38. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hargai, motivasi dan

inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Untuk hasil kriteria budaya kerja Pangkalan PSDKP Batam dengan rincian sebagai berikut.

No	KRITERIA	NILAI
1	Tim Satker	5
2	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	5,5
3	Lima Menit Sebelum Jadwal	4,18
4	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5 R)	8
5	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	6
6	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	6
7	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	6,7
8	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	10
9	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	6
10	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	9
11	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	10
12	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	5
TOTAL		81,38

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan formulasi perhitungan capaian meskipun narasi Indikatornya sama dan capaian ini juga menjadi capaian periode akhir renstra. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 25.572.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.571.133,- atau 99,99%. Untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan lainnya sebagai berikut.



Capaian indikator ini pada Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Jakarta, Lampulo, Bitung, Tual dan Benoa. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen budaya kerja serta pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja telah dilakukan.

22) Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	1	1	100,00
		2023	1	1	100,00
		2024	1	1	100,00

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan tercapai 1. Inovasi Pangkalan PSDKP Batam adalah GEO MARFISH 2.0 dengan tujuan untuk mempermudah perolehan data pengawasan dan peta kerawanan bidang kelautan dan perikanan. Dengan adanya aplikasi ini, pengawas perikanan dan Polsus WP3K dapat mengetahui lokasi pasti pelaku usaha yang akan maupun sudah dilakukan pengawasan. Hal ini tentu membantu tugas petugas dalam

pelaksanaan kegiatan. Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2023 membuat inovasi aplikasi GEO MARFISH. Pada tahun 2024 terdapat penambahan *tool* dan database Capaian pada indikator ini pada tahun 2023 dan 2024 sama yaitu 1 inovasi yang juga menjadi capaian periode akhir renstra.

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 25.572.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.571.133,- atau 99,99%. Untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan lainnya sebagai berikut.



Pangkalan PSDKP Batam beserta dengan UPT lainnya telah membuat masing-masing satu inovasi. Inovasi ini harapannya dapat membawa perubahan di UPT, sehingga dapat mempermudah pekerjaan pegawai.

23) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

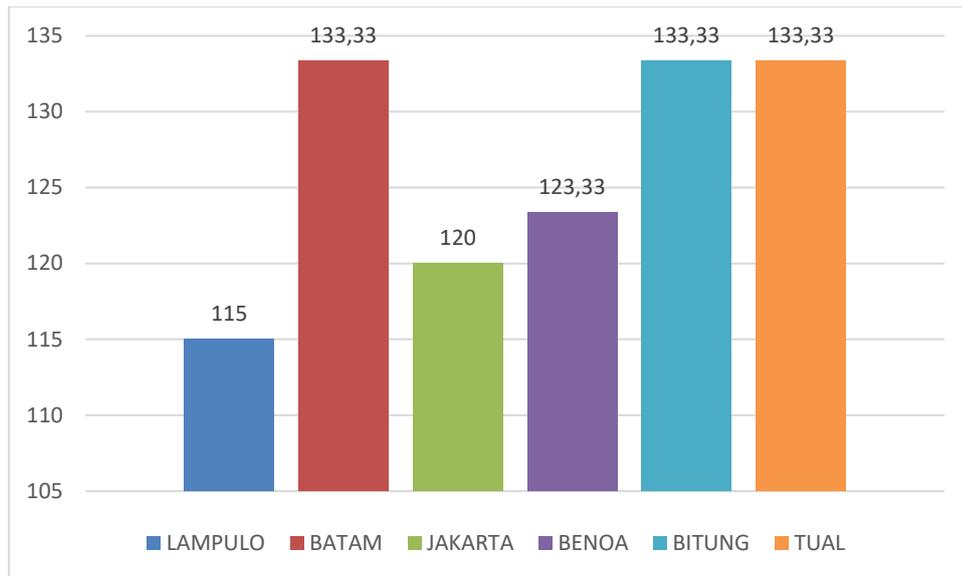
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	82	85	103,66
		2021	84	89,72	105,95
		2022	86	100	116,28
		2023	92	133,33	120,00
		2024	94	133,33	120,00

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 133,33%. Semula pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi *bitrix.24*, namun sekarang sudah diganti dengan aplikasi portal.kkp (*collaboration office/coofis*). Optimalnya pencapaian ini karena pegawai *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis Postingan* yang dilakukan yaitu minimal delapan kali dalam tiga bulan dengan memperhatikan isi berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya.

Diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. ⁽²⁾ keikutsertaan pada aplikasi *coofis* (Level 3 dan 4) dan ⁽³⁾ keaktifan pada aplikasi *coofis* (Level 3, 4 dan staf). Optimalnya pencapaian ini karena operator *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis. Postingan* yang dilakukan yaitu minimal per triwulan sebanyak 8 berita yang mengandung 5W+1H. Untuk rincian penilaian sebagai berikut.

Level	Keaktifan (Kali)								Realisasi	Target	%
	Aktif 1	Aktif 2	Aktif 3	Aktif 4	Aktif 5	Aktif 6	Aktif 7	Aktif 8			
Kepala	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	133,33
Ketua Tim Kerja									20	15	133,33
Dukungan Manajemen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Penanganan Pelanggaran	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4	3	
									Rata-rata		133,33

Capaian pada tahun 2024 dan 2023 sama yaitu sebesar 133,33% dimana juga sebagai capaian akhir periode renstra. Hal ini dikarenakan operator *coofis* di Pangkalan PSDKP Batam rata-rata melakukan *postingan* sebanyak 8 kali dalam setiap triwulan yang mengandung unsur 5W+1H. Selain itu jumlah operator mengalami penambahan yang semula operator yang semula 6 operator menjadi 15 operator dengan ditambahkannya 9 operator dari Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 22.665.000,- dan terealisasi Rp. 22.576.894,- atau 99,61%. Untuk perbandingan capaian per UPT Pangkalan sebagai berikut.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Lampulo, Jakarta dan Benoa, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat keaktifan penggunaan dan postingan pada aplikasi *coofis* Pangkalan PSKDP Batam lebih banyak.

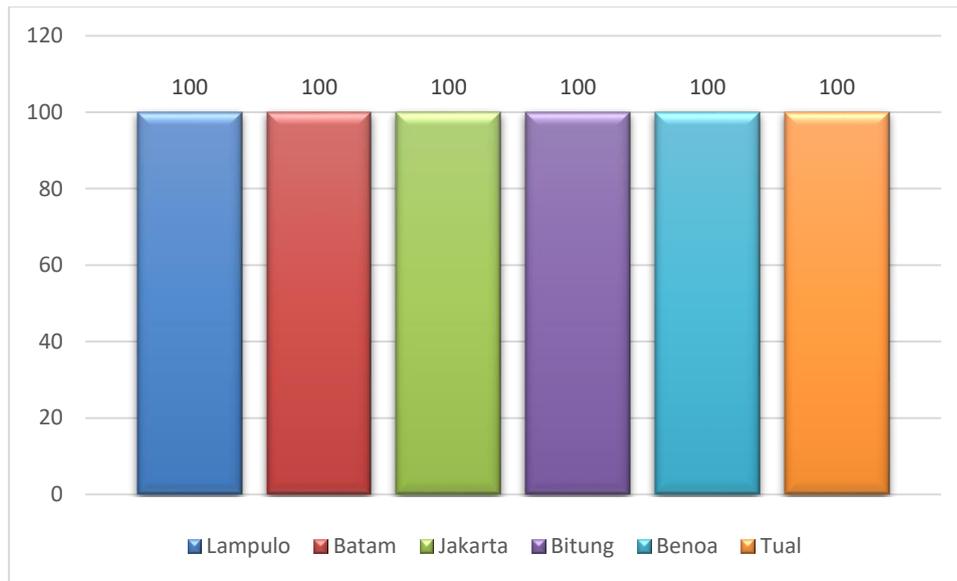
24) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	72,5	100	120,00
		2022	75	100	120,00
		2023	77,5	100	120,00
		2024	80	100	120,00

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian indikator ini sama yaitu 100% Dimana juga sebagai capaian akhir periode renstra. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola BMN Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan lancar. Adapun rincian capaian nilai sebagai berikut. Pada tahun 2024 pagu tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yaitu pelaksanaan pengelolaan BMN sebesar Rp. 62.599.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.598.904,- atau 99,99%. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam pada indikator ini sama yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen serta pengelolaan BMN berjalan dengan baik.

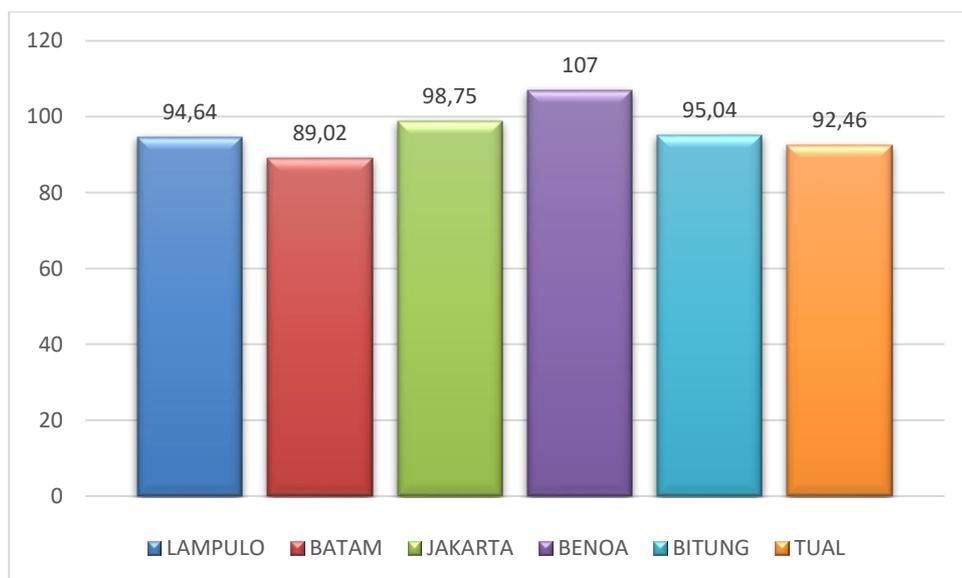
25) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK25	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	72,5	89,73	120,00
		2022	75	100	120,00
		2023	77,5	94,38	120,00
		2024	80	89,02	111,28

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan menjadi target tahunan serta tercapai 89,02. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian indikator ini terdapat selisih sebesar 5,36% yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari tim pengelola pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP sehingga kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Pangkalan PSDKP Batam dapat berjalan dengan lancar. Adapun rincian capaian nilai pengelolaan barang dan jasa sebagai berikut. Pada tahun 2024 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp. 360.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 359.974.500,- atau 99,99%. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian Pangkalan PSDKP Batam pada indikator ini masih belum optimal namun sudah melampaui target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan masih adanya pengadaan yang tertunda dan harus dilaksanakan pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, capaian pada indikator ini memenuhi target yang ditentukan.

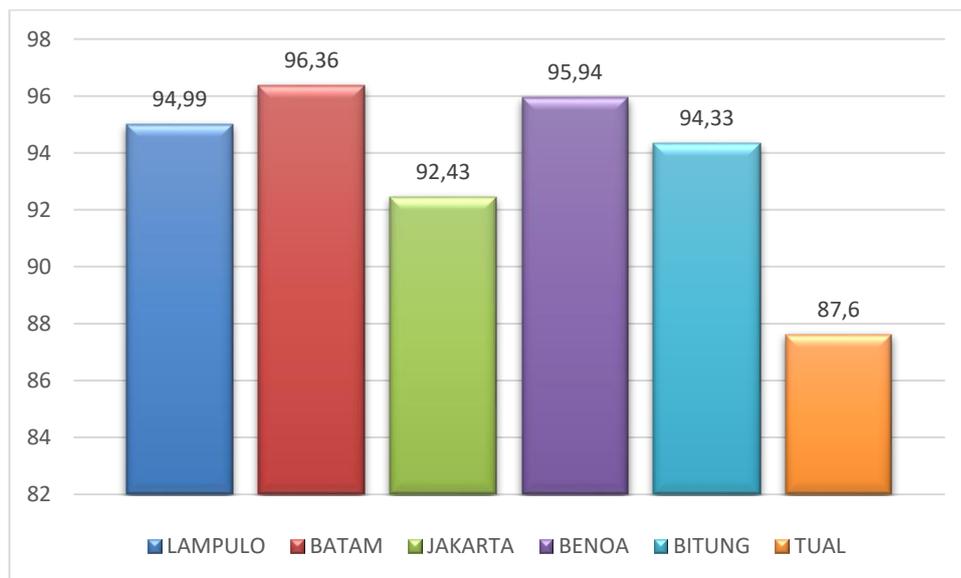
26) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK26	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	2020	88	94,06	106,89
		2021	89	97,08	109,08
		2022	89	96,09	107,97
		2023	93,75	91,59	97,70
		2024	93,76	96,36	102,77

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 93,76 dan tercapai 96,36. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu ⁽¹⁾ Revisi DIPA, ⁽²⁾ Deviasi DIPA ⁽³⁾ Pengelolaan UP, ⁽⁴⁾ LPj Bendahara, ⁽⁵⁾ Data Kontrak, ⁽⁶⁾ Penyelesaian Tagihan, ⁽⁷⁾ Penyerapan Anggaran Tahun 2022 ⁽⁸⁾ Retur SP2D, ⁽⁹⁾ Perencanaan Kas, ⁽¹⁰⁾ Pengembalian SPM, ⁽¹¹⁾ Dispensasi SPM dan ⁽¹²⁾ Pagu Minus dengan rincian sebagai berikut.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	92.93	89.77	98.67	100.00	95.96	100.00	96.36	100%	0.00	96.36
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.94	17.95	9.87	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	96.47			96.10			100.00				

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian dengan tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 4,77 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal tersebut dikarenakan kualitas pelaksanaan anggaran berjalan optimal pada pengelolaan dan penyerapan UP serta TUP. Selain itu juga terpenuhinya seluruh target output sehingga capaian output Pangkalan PSDKP Batam mendapat nilai 100. Adapun anggaran tahun 2024 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 208.536.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 208.534.329,- atau 99,99%. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSKDP Jakarta, capaian Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan UP dan TUP serta deviasi halaman III DIPA lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan Jakarta, sehingga mempengaruhi nilai total IKPA.

27) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK27	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	82	95	120,00

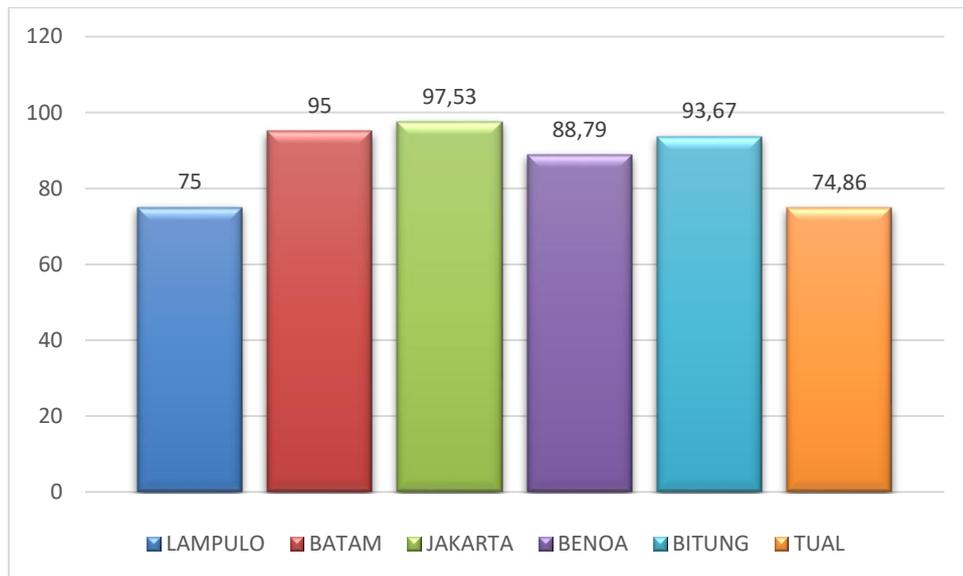
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 82 dan tercapai 95. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan terget yang telah direncanakan sebelumnya. Tercapaiannya indikator ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu serta pelaksanaan perencanaan anggaran.

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru ditargetkan ke UPT pada tahun 2024 yang mana juga pada periode akhir renstra. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Untuk rincian NKA dapat dilihat pada gambar 3 berikut.

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓	
1	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	95,00	100,00	100,00	66,65	

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 208.536.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 208.534.329,- atau 99,99%.

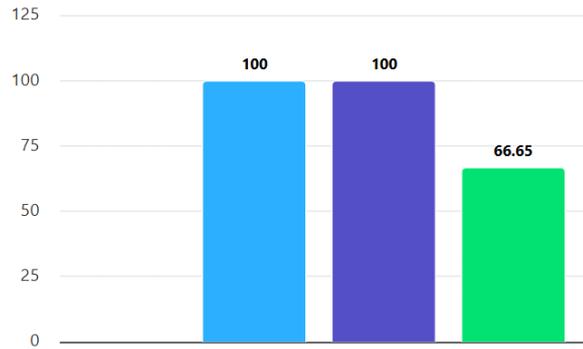
Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo, Bena, Bitung dan Tual, capaian Pangkalan PSKDP Batam lebih tinggi karena target perencanaan pada Pangkalan PSKDP Batam berjalan dengan baik.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 terbilang efisien.



Efisiensi tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan seluruhnya dengan penyerapan anggaran yang efisien. Sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan dan kelautan terutama pengawasan budidaya perikanan, kapal perikanan, pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi, pengawas perikanan serta polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam melakukan *onboard* pada kapal pengawas maupun speedboat pada saat unit-unit pengawasan tersebut melakukan operasi. Sehingga hal ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran terutama untuk transportasi perairan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 sebesar Rp. 56.960.187.000,- Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 56.928.956.696,- atau 99,95%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	29.612.566.000	29.268.079.469	99,94
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.230.000.000	1.228.009.919	99,84
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.699.210.000	2.694.698.427	99,83
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.405.790.000	1.401.654.632	99,71
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	22.347.621.000	22.336.514.249	99,95
TOTAL			56.960.187.000	56.928.956.696	99,95

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kegiatan Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM). Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis serta evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **104,25** dengan predikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan, sehingga sebagian besar kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran SPKP belum sepenuhnya dilakukan permintaan keterangan yang berdomisili di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam	Permohonan bantuan kepada UPT PSDKP untuk bantuan permintaan keterangan ataupun melakukan permintaan keterangan melalui <i>zoom meeting</i>
2.	Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam belum melakukan postingan berita pada portal KKP tepat waktu	Monitoring postingan Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada portal KKP

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PSDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Turman Hardianto Maha**
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Pung Nugroho Saksono**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PSDKP BATAM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	80
		15	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	84
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	70
		22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	94
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	93,76
		27	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71

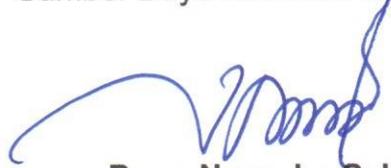
Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	32.011.761.000
2.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.230.000.000
3.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.941.415.000
4.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.455.790.000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	22.347.621.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024		59.986.587.000

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha